

**PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM
PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN KONSTITUSIONALISME**

SKRIPSI

Oleh :

NUSROTUM MILLAH

NIM : 05020720021



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nusrotum Millah
NIM : 05020720021
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Politik Hukum Masa Jabatan Kepala Desa dalam
Perspektif Demokrasi dan Konstitusionalisme

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Nusrotum Millah
NIM. 05020720021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

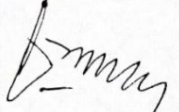
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nusrotum Millah
NIM. : 05020720021
Judul : Politik Hukum Masa Jabatan Kepala Desa dalam
Perspektif Demokrasi dan Konstitusionalisme.

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqosah.

Surabaya, 22 Mei 2024
Pembimbing,



Dr. Lutfil Ansori, M.H. ?
NIP. 198311132015031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ditulis oleh:

Nama : Nusrotum Millah

NIM : 05020720021

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 06 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

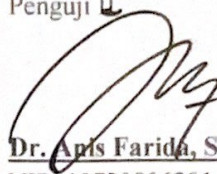
Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



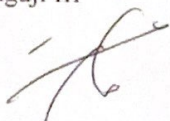
Dr. Lutfil Ansori, M.H.
NIP. 198311132015031001

Penguji II



Dr. Apis Farida, S.Sos., S.H., M.Si.
NIP. 197208062014112001

Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji IV



Mega Avu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 06 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196503271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUSROTUM MILLAH
NIM : 05020720021
Fakultas/Jurusan : STARIAH DAN HUKUM / HUKUM
E-mail address : 05020720021@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF
DEMOKRASI DAN KONSTITUSIONALISME

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis


(Musrotum Millah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Kepala desa memegang peranan penting dalam menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Seiring dengan semakin tingginya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, masa jabatan kepala desa menjadi salah satu isu krusial yang perlu ditelaah lebih dalam, baik dari sisi legalitas maupun pelaksanaannya dalam konteks demokrasi dan konstitusionalisme. Kepala Masa jabatan kepala desa diatur oleh undang-undang, yang bertujuan untuk memastikan adanya pergantian kepemimpinan secara periodik serta mencegah terjadinya monopoli kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat serta mengganggu stabilitas dan kemajuan desa. Permasalahan yang telah disebutkan dituang kedalam penelitian yang berjudul “Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusionalisme”. Penelitian ini berfokus pada yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai masa jabatannya apakah telah sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusionalisme. Kedua bentuk perpanjangan masa jabatan kepala desa seperti apa yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusionalisme.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data atau bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka buku, jurnal, artikel, dan peraturan-peraturan yang berkaitan.

Masa jabatan kepala desa yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusionalisme karena memberikan kesempatan bagi perubahan kepemimpinan dengan efisiensi waktu yang baik, sehingga dapat mencegah adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan. Namun, perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut karena memperpanjang masa kepala desa, yang dianggap mengabaikan pembatasan kekuasaan dan potensial merugikan masyarakat dengan membatasi hak-hak mereka.

Demikian, penelitian ini menemukan bahwa diperlukan peningkatan kesadaran hukum bagi lembaga-lembaga pengawas dan pemangku kekuasaan dalam perubahan atau pembuatan undang-undang untuk memastikan bahwa konstitusionalisme dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat desa.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Bahan Hukum.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
I. Sistematika Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN TEORITIK PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONALISME	23
A. Pemerintahan Desa di Indonesia.....	23
1. Pemerintahan Desa.....	23
2. Politik Hukum pemerintahan Desa	28

B. Demokrasi dan Konstitusionalisme	30
1. Pengertian Demokrasi	30
2. Prinsip Demokrasi	36
3. Demokrasi Lokal	38
4. Prinsip Konstitusionalisme.....	41
5. Demokrasi Konstitusionalisme dalam Negara Hukum	45
BAB III MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	47
A. Sejarah Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia	47
B. Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	50
C. Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Prinsip Demokrasi dan Konstitusionalisme.....	54
BAB IV PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN PRINSIP DEMOKRASI DAN KONSTITUSIONALISME	57
A. Politik Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa	57
B. Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa menurut Prinsip Demokrasi dan Konstitusionalisme.....	60
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Asshiddiqie, S.H., Prof. Dr. Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Aziza, Calista. "30 September 1965: Mengenang Peristiwa G30S/PKI." Accessed March 11, 2024. <https://elshinta.com/news/280559/2022/09/30/30-september-1965-mengenang-peristiwa-g30spki>.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar ilmu politik*. Cet. pert. rev. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- "Cegah Korupsi Dana Desa | ICW." Accessed May 22, 2024. https://antikorupsi.org/id/article/cegah-korupsi-dana-desa#_ftn1.
- Dahl, Robert A., and A. Rahman O. Zainuddin. *Perihal demokrasi: menjelajahi teori dan praktek demokrasi secara singkat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Danil, Muhammad. "Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK NO 42/PUU-XIX/2021 tentang Masa Jabatan Kepala Desa." Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/>.
- Eko Yunanto, Sutoro, ed. *Implementasi UU Desa: Perspektif Hukum Tata Negara Dan Hukum Ekonomi*. Jawa Timur: Inteligencia Intrans Publishing, 2018.
- Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, and Sugiman Sugiman. "Pemerintahan Desa." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (July 30, 2018): 82–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>.
- Festianto, Dian, and Maxianus Mnune Suni. "Model Demokrasi Lokal (Studi Penelitian Pada Pemilihan Kepala Desa Fatusene Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara)." *Jurnal Poros Politik*, n.d.
- H, Hildayanti. "PERIODESASI JABATAN KEPALA DESAMENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014(Studi Kasus Di Desa Pakuncen, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang Provinsi Banten)." *Universitas Islam Negeri "SMH" Banten*, 2018.
- "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring." Accessed April 24, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konstitusi>.
- Jaidun. "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Demokrasi." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 1 (Desember 2022).
- Kansil, C. S. T. *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia Jilid I, Pengantar ilmu hukum: Semester ganjil*. Cetakan kesembilan. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Kartasasmita, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES, 1996.
- Kasih, Ekawahyu. "Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." *Jurnal Lemhannas RI* 6, no. 2 (2018). <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/121>.

- kusriyah, sri. *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah : Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Semarang: UNISSULA PRESS, 2019.
- L.H, Subroto. “Lahirnya Demokrasi di Negara-negara Dunia Halaman all.” KOMPAS.com, February 12, 2022. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/02/12/140000879/lahirnya-demokrasi-di-negara-negara-dunia>.
- Luthfy, Riza Multazam. “MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI.” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (October 16, 2019): 319. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330>.
- . “MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI.” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (October 16, 2019): 319. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330>.
- . “POLITIK HUKUM PENGATURAN PERATURAN DESA DALAM PRODUK HUKUM.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (December 23, 2021): 492. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.758>.
- M Marzuki, Peter. *Penelitian hukum*. 14th ed. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mahfud, Moh. “Konstitusionalisme dan Konstitusi di Negara Republik Indonesia,” n.d.
- Marzuki, M. Laica. “Konstitusi Dan Konstitusionalisme.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 001–008. <https://doi.org/10.31078/jk741>.
- Maslul, S. “KONSTRUKSI HUKUM MASA JABATAN KEPALA DESA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XIX/2021.” *UIN Sunan Kalijag Yogyakarta*, 2022.
- Mawardani, R.A. “Sejarah Demokrasi Di Indonesia Dan Perkembangannya Dari Masa Ke Masa.” Accessed March 11, 2024. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6243165/sejarah-demokrasi-di-indonesia-dan-perkembangannya-dari-masa-ke-masa>.
- Muchamad Rinaldi, and Sutopo Sutopo. “Analisis Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 2022 dalam Perspektif Demokrasi Modern (Studi Kasus di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan).” *JOSH: Journal of Sharia* 2, no. 1 (January 20, 2023): 51–57. <https://doi.org/10.55352/josh.v2i1.178>.
- Muntoha, Muntoha. “DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM.” *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 16, no. 3 (2009): 379–95. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art4>.
- Nasir, Moh. *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- “Perjalanan Panjang Kepala Desa Tuntut Masa Jabatan 8 Tahun 2 Periode Halaman All - Kompas.Com.” Accessed May 22, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/07/08024291/perjalanan-panjang-kepala-desa-tuntut-masa-jabatan-8-tahun-2-periode?page=all>.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. “Kenali Berbagai Modus Korupsi di Sektor Desa - ACLC KPK.” Accessed May 22, 2024. <https://aclc.kpk.go.id/aksi->

- informasi/Eksplorasi/20230821-kenali-berbagai-modus-korupsi-di-sektor-desa.
- Raco, Jozef. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Ramadhan, Iqra. "INDONESIA ADALAH NEGARA DEMOKRASI," February 5, 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7d6fj>.
- RI, Setjen DPR. "Esensi Revisi UU Desa Perkuat Hak Berdaulat Masyarakat Bangun Desa." Accessed May 22, 2024. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45623>.
- . "Puteri Komarudin: Revisi UU Desa Untuk Percepatan Pembangunan Desa." Accessed May 22, 2024. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46862>.
- Romli, Lili. *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sajogyo, Pujiwati. *Sosiologi pedesaan : kumpulan bacaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 1996.
- Satjipto, Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pub, 2006.
- Sudarto. *Hukum dan hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Suharmartha, Sherly Danti. "ANALISIS PENGATURAN PERIODE JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG DESA." *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2023.
- Suhunan, Evaline, Purba Made Aubrey, and Rasji Rasji. "Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (May 12, 2023): 1877–84. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.514>.
- Sukriono, Didik. *Pembaharuan hukum pemerintah desa: politik hukum pemerintahan desa di Indonesia*. Setara Press, 2010.
- Suny, Ismail. *Pergeseran kekuasaan eksekutif: suatu penjelidikan dalam hukum tatanegara*. Aksara Baru, 1977.
- Suryanto. *Pengantar Ilmu Politik*. Pustaka Setia, 2018.
- Susanti, Dyah Ochtarina, and A'an Efendi. *Penelitian hukum (legal research)*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2014.
- Syarifudin, Ateng. *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: Republik Desa, 2010.
- Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, and Ni'matul Huda. *Teori dan hukum konstitusi*. 1st ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Trihusodo, Putut. "Kehidupan Demokrasi Indonesia 2021 Mengalami Kemajuan." Accessed March 11, 2024. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4194/kehidupan-demokrasi-indonesia-2021-mengalami-kemajuan>.
- "Usulan Masa Jabatan Kades Menjadi 9 Tahun, Dosen Politik UI: Apakah Masyarakat Butuh Usulan Tersebut? – Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik – Universitas Indonesia." Accessed January 22, 2024.

- <https://fisip.ui.ac.id/usulan-masa-jabatan-kades-menjadi-9-tahun-dosen-politik-ui-apakah-masyarakat-butuh-usulan-tersebut/>.
- Wahyudi, Sigit. "Demokrasi di Tingkat Lokal," March 2009.
- Wahyuni, Willa. "Periode Sistem Pemerintahan Demokrasi Terpimpin Di Indonesia." Accessed March 11, 2024.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/periode-sistem-pemerintahan-demokrasi-terpimpin-di-indonesia-lt6239a34782507/>.
- Warsudin, Dudi, and Hayatun Hamid. "KAJIAN TEORITIS TERHADAP RENCANA PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA SELAMA 9 TAHUN DIHUBUNGKAN DENGAN KONSEP NEGARA HUKUM DAN PRINSIP DEMOKRASI." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 1 (February 2, 2023): 422–28.
<https://doi.org/10.31604/jips.v10i1.2023.%p>.
- Widjaja, Alia Harumdani. "Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (November 2, 2017): 351. <https://doi.org/10.31078/jk1426>.
- Widjaja, H. A. W. *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. RajaGrafindo Persada, 2003.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A